



## **Pelatihan Penataan dan Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang Baik di Kabupaten Meranti**

**Khodijah Ishak<sup>1\*</sup>, Een Erlina<sup>2</sup>, Muhammad Elsa Tomisa<sup>3</sup>, Muhammad Isa Selamat<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ekonomi Islam, STIE SYARI'AH Bengkalis

<sup>2</sup>Program Studi Sarjana Akuntansi Syari'ah, STIE SYARI'AH Bengkalis

<sup>3</sup>Program Studi Sarjana Perbankan Syari'ah, STIE SYARI'AH Bengkalis

<sup>4</sup>Program Studi Sarjana Manajemen Bisnis Syari'ah, STIE SYARI'AH Bengkalis

khodijah@stiesyariah bengkalis.ac.id\*

### **Article History:**

Received: 13-10-2024

Revised: 18-10-2024

Accepted: 19-10-2024

**Keywords:** Penataan;  
Pengelolaan Keuangan;  
Tata Kelola; Desa

**Abstract:** Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa bertanggung jawab mengelola dan melaksanakan pembangunan di desa. Pemerintah pusat menyediakan sumber daya keuangan yang sangat signifikan kepada desa untuk pengelola seluruh potensinya guna meningkatkan pendapatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Tertib pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tertib dan disiplin anggaran dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, tertib disiplin anggaran. Pengabdian masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah pemerintah desa. Peserta kegiatan ini sebanyak 120 orang. Kegiatan ini dilakukan melalui sesi offline. Kegiatan ini melibatkan sistem informasi pelaporan keuangan desa termasuk anggaran, akuntansi pelaporan keuangan termasuk entri transaksi, buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa, buku setoran, daftar transaksi dan daftar jurnal. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tata kelola desa dan pengelolaan laporan keuangan. Adapun hasil dalam pengabdian adalah perlunya penyusunan laporan keuangan tingkat desa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kendala dalam penyusunan laporan keuangan desa karena keterbatasan sumber daya manusia.

© 2024 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

## **PENDAHULUAN**

Keuangan desa dalam pengelolaannya mengacu pada seluruh kegiatan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, (Haq & Muzakki, 2023). Pengelolaan keuangan desa yang baik didasarkan regulasi yang ada dan kapasitas sumber daya manusia yang mengelolanya, (Hasanah, 2020). Menurut (Said et al., 2023) menjelaskan pengelolaan keuangan desa merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah desa untuk menyusun laporan keuangan desa yang berkualitas. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan menyebutkan bahwa keuangan desa adalah segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan berbentuk uang atau barang. Pemenuhan kewajiban dan hak desa. Keuangan desa biasanya bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan dana pemerintah.

Menurut buku saku “Dana Desa” yang diterbitkan Kementerian Keuangan, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran desa dalam jumlah yang cukup besar untuk digunakan oleh desa setiap tahunnya, (Barus & Sinaga, 2023; Indriani et al., 2021; Pramana et al., 2022). Adapun dana pendapatan dan belanja desa untuk wilayah kabupaten kepulauan Meranti Provinsi Riau pada tahun 2022 dan 2023 terus meningkat. Pendapatan dan belanja pemerintah desa tergambar pada gambar 1 sebagai berikut:

Rincian/ Items (1)	2022		2023
	Anggaran/ Budget (2)	Realisasi/ Realization (3)	Anggaran/ Budget (4)
<b>I. PENDAPATAN REVENUE</b>	<b>159.943.086.158</b>	<b>150.076.558.319</b>	<b>169.528.851.656</b>
1. Pendapatan Asli Desa Village Own-Source Revenue	381.986.982	513.061.863	45.561.448
2. Pendapatan Transfer Transfer Revenue	158.565.850.112	148.568.264.192	169.209.921.536
2.1 Dana Desa Village Fund	85.239.185.408	85.239.185.408	96.193.044.480
2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Revenue Sharing Fund of Tax and Retribution of Regency/Municipality	0	1.810.493.952	0
2.3 Alokasi Dana Desa Village Fund Allocation	99.760.144.384	47.952.064.512	73.016.877.056
2.4 Bantuan Keuangan Provinsi Financial Assistance Province	13.566.520.320	13.566.520.320	0
2.5 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Financial Assistance Regency/Municipality	0	0	0
3. Pendapatan Lain-lain Other Revenue	995.249.064	995.232.264	273.368.672
<b>II. BELANJA DAERAH EXPENDITURE</b>	<b>140.740.124.106</b>	<b>138.655.485.666</b>	<b>171.761.694.242</b>
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Village Administration Sector	56.673.799.096	46.476.317.488	63.954.169.653
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Village Development Sector	34.154.506.126	30.890.675.438	64.669.491.904
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Community Supervisory Sector	13.274.243.324	11.563.918.556	16.291.652.753
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Community Empowerment Sector	15.192.697.096	14.875.368.936	20.581.887.772
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Management of Disaster, Emergencies, and Urgent Sector	21.444.878.464	34.849.205.248	6.264.492.160
<b>III. PEMBIAYAN FINANCING</b>	<b>-2.383.020.800</b>	<b>-2.383.020.800</b>	<b>2.232.842.586</b>

**Gambar 1.** Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (Rupiah), 2022 dan 2023

Data pada gambar 1 membuktikan bahwa jumlah dana desa yang diterima desa sangat tinggi dan berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2022, total penerimaan dana desa di kabupaten Kepulauan Meranti adalah 140.740.124.106 dan pada tahun 2023 sebanyak 171.761.694.242. Dengan kata lain, untuk menghindari terjadinya penyelewengan pada pengelolaan anggaran desa, maka pengelolaan keuangan dana desa memerlukan bimbingan maupun pengawasan pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan dana desa agar menjadi semakin sempurna, (Masruhin & Kaukab, 2019). Mengamati dari fenomena yang ada pada tahap pelaporan keuangan dana desa, analisis penggunaan dana desa setiap tahunnya berbeda-beda karena kebutuhan desa dan kurangnya pemahaman aparat desa, serta masih dianggap membingungkan. Banyak keluhan yang diterima oleh instruktur pelatih masalah pelaporan dana desa, (Sulaeman, 2021). Pengungkapan dana desa tidak dapat dihindari karena laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban desa kepada pemangku kepentingan, diantaranya masyarakat dan negara, agar kualitas pengelolaan keuangan desa baik maka harus dikelola berdasarkan prinsip kepatuhan, efisiensi, efektifitas, transparan dan akuntabel dan dilakukan secara disiplin dan tertib anggaran, (Auliantari et al., 2022; Ridwan, 2016; Savitri et al., 2019). Prinsip kepatuhan ini juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan daerah Desa, dimana pengelolaan keuangan desa dikelola berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif. dan diimplementasikan secara tertib dan disiplin anggaran, (Permendagri, 2018).

Alokasi Dana Desa mewujudkan hak masyarakat desa yang wajib dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan, (Marthen Lona, 2023). Pengalokasian dana desa adalah untuk menunjukkan penghormatan terhadap otonomi desa agar desa dapat matang dan berkembang sesuai pertumbuhannya atas dasar keberagaman, partisipasi, otonomi dan memperkuat fungsi pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (Pranata et al., 2023). Penggunaan dana desa yang dialokasikan desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penggunaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, oleh karena itu, pemerintah desa harus mampu mengelola secara transparan, bertanggungjawab dan tanpa penyalahgunaan, (Dilson & Noviardi, 2017). Kejelasan tujuan anggaran memastikan bahwa anggaran dipahami dengan baik oleh mereka yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan keuangan. Maka dari itu, tujuan anggaran daerah harus dinyatakan dengan jelas, akurat dan mudah dipahami oleh penanggung jawab penyusunan dan pelaksanaan program anggaran, (Tomisa & Sutrisno, 2018). Adanya tujuan anggaran yang jelas akan memudahkan dalam mempertanggungjawabkan berhasil tidaknya menjalankan fungsi organisasi guna mencapai maksud dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, (Ishak et al. 2022).

Kebutuhan akan pemerintahan yang bersih, pemerintah yang baik pasti akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat merupakan sebuah tren yang semakin nyata, (Oktari et al., 2022; Permatasari, 2020). Sektor pemerintahan diharapkan untuk terus menerus melakukan *self assessment* dan terus meningkatkan kinerjanya yang beroperasi secara efektif, efisien dan ekonomis, (Khoirin et al., 2024b). Untuk membangun pemerintahan desa yang baik dan bersih, ditandai dengan tiga pilar yang utama yang pada hakikatnya merupakan unsur-unsur yang saling bergantung. Elemen dasar tersebut adalah transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Terselenggaranya penyelenggaraan pengelolaan pemerintah yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi rakyat dan mewujudkan tujuan serta cita-cita bangsa, (Moeheriono, 2007).

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada 06 Maret 2024 di ruang pertemuan kantor Bupati kepulauan Meranti. Metode pelaksanaan aktivitas khidmat Masyarakat ini berupa pelatihan, pemberian materi dan diskusi dengan pemerintah desa yang melibatkan bendahara desa. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi beberapa langkah, (Nurmahadi et al., 2024):

### **1. Persiapan**

Persiapan kegiatan ini pimpinan dan anggota tim kegiatan berkoordinasi dengan P3M STIE Syari'ah Bengkalis, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten meranti, Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti, camat dan Desa.

### **2. Pelaksanaan Kegiatan**

Ketua dan tim pada tahap ini menganalisis situasi dan melaksanakan kegiatan yang dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada dengan mitra. Tim kemudian bersama narasumber menyampaikan cara penataan dan penyusunan laporan keuangan.

### **3. Pelatihan**

Pada fase ini pimpinan dan anggota tim memberikan pendidikan dan dukungan mitra dalam mengimplementasikan materi yang diterimanya dan dapat membantu mitra mengatasi hambatan yang dihadapi, (Khoirin et al., 2024b).

#### 4. Publikasi dan Pelaporan

Fase ini pimpinan dan tim akan menyiapkan laporan perkembangan, laporan akhir aktivitas khidmat masyarakat, serta publikasi di media *online*.

#### 5. Evaluasi

Ketua dan tim melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang diajukan untuk memastikan rencana terlaksana sesuai dan mendukung mitra apabila menemui permasalahan pada saat pelaksanaan kegiatan, (Erlina et al., 2024).

Kegiatan pelatihan khidmat masyarakat ini menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi, (Khoirin et al., 2024a). Untuk mencapai tujuan pelatihan ini, kegiatan ini berlangsung dalam 3 tahapan:

##### 1. Metode Ceramah

Langkah pertama melakukan diskusi dan koordinasi terlebih dahulu kepala Bupati Kepulauan Meranti, Kepala Dinas Pemberdayaan Desa, Camat, Kelurahan dan Kepala desa yang termasuk kabupaten Kepulauan Meranti terkait dengan pelaksanaan dan sasaran desa wilayah setempat. Kemudian mengadakan koordinasi dan diskusi singkat untuk memahami kebutuhan dan permasalahan yang timbul di lingkungan terkait pengelolaan keuangan dan pihak yang berpartisipasi tertarik dan termotivasi untuk mengelola dana desa yang baik. Peserta juga dibagikan materi tentang urgensi pelaporan keuangan dana desa sebagai wujud pertanggungjawaban. Fase pertama berlangsung 2 jam.

##### 2. Metode Tutorial

Fase kedua adalah melakukan aktivitas. Melatih peserta memahami manfaat dan pentingnya perencanaan dan penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya peserta dibekali materi tentang materi bagaimana penyusunan keuangan desa secara baik sebagai wujud akuntabilitas dan kepatuhan terhadap Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan dijalankan secara tertib dan disiplin peraturan perundang-undangan. Fase kedua berlangsung 2 jam.

##### 3. Metode Diskusi dan Evaluasi

Langkah ketiga adalah penilaian dan pemantauan. Tujuan evaluasi dalam program ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap pelaporan keuangan. Peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan terkait pengorganisasian dan penyusunan laporan keuangan dana desa yang mereka temui. Cara mengukurnya peserta diminta mencatat transaksi keuangan. Fase ketiga berlangsung 2 jam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menyusun dan mensintesis keuangan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Meranti melalui program pengabdian STIE Syari'ah Bengkalis. Tujuannya untuk meningkatkan dan menjamin transparansi dan akuntabilitas dari sektor publik kepada pemerintah Desa. Informasi keuangan yang dihasilkan dapat memberikan serangkaian informasi yang komprehensif kepada pemangku kepentingan, (Sahroni et al., 2024). Khususnya bagi membutuhkan informasi tentang keuangan desa.

Sebagai barang publik yang dipergunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan dan kegiatan desa, (Rivan et al., 2019). Keuangan Desa harus dikelola dengan mengacu pada hasil atau prestasi. Hasil atau capaian desa harus berorientasi pada efisiensi dan efektivitas, (Khoirin et al., 2024a). Untuk mencapai hal tersebut, pengelolaan keuangan yang baik juga diperlukan.

Penyusunan laporan keuangan tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban yang harus dilakukan oleh otoritas tingkat komunitas, namun dalam penyusunan laporan keuangan harus memperhatikan tiga asas yang menjadi dasar pengelolaan keuangan yaitu:

1. Asas transparansi atau keterbukaan, berarti memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, atau setiap orang mempunyai akses dan hak keuangan untuk dapat memahami proses pengelolaan keuangan terkait dengan keinginan masyarakat.
2. Asas akuntabilitas merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik, artinya selain mengetahui tentang anggaran, masyarakat juga harus mengetahui bahwa penanggung jawab dan implementasi anggaran bukan hanya berhak untuk mengetahui tentang anggaran tetapi tetap mempunyai hak untuk mengetahui. Tahu sampai sejauh mana memiliki hak untuk menuntut tanggung jawaban atas rencana atau pelaksanaannya. Perencanaan atau pelaksanaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan dan mampu membuat laporan secara efektif.
3. Prinsip *value for money*, yaitu harus didasarkan pada prinsip-prinsip utama penganggaran, khususnya ekonomi meliputi pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang lebih rendah. Efisiensi artinya dari anggaran yang digunakan dapat memberi dampak atau membawa hasil yang baik bagi perusahaan. Efisiensi artinya dari anggaran yang digunakan sesuai dengan kepentingan perusahaan (Niam et al., 2024).

Khusus pelatihan penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi SIKADES di Pemerintah Desa Kepulauan Meranti berjalan dengan lancar. Kegiatan ini diikuti oleh 120 orang yang merupakan bendahara dari kecamatan dan desa di wilayah tersebut. Untuk menghasilkan laporan keuangan desa, dapat menggunakan aplikasi SIKADES, aplikasi ini berbasis penginputan data melalui transaksi penerimaan dan pengeluaran yang selanjutnya melalui proses otomatisasi penjurnalan untuk dimasukkan kedalam aplikasi SIKADES sebagai mana diamanahkan pada Permendagri No. 113 Tahun 2014. Sistem aplikasi ini memiliki keunggulan diantaranya tidak perlu melakukan penjurnalan manual, dapat melihat *update* otomatis laporan pencapaian alokasi anggaran pendapatan dan belanja desa serta dapat melihat *update* otomatis aset desa.



**Gambar 2.** Narasumber Memberikan Materi

Pada pelatihan ini peserta dilatih praktik penggunaan aplikasi SIKADES. Peserta belajar cara menginstal aplikasi dan mengonfigurasinya di laptop pribadinya. Peserta juga belajar memahami setiap fungsi dari aplikasi SIKADES. Selain itu, para peserta juga diajarkan bagaimana cara mencatat transaksi secara harian dan menghasilkan laporan keuangan secara otomatis menggunakan aplikasi ini. Layar utama program aplikasi

SIKADES terdiri dari beberapa menu utama pada menu bar yang merupakan menu-menu yang terintegrasi dan saling berhubungan. Menu aplikasinya adalah sebagai berikut:



**Gambar 3.** Tampilan Utama SIKADES

Untuk memberikan kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi SIKADES pemateri juga menampilkan tampilan awal program aplikasi SIKADES kepada peserta pelatihan, menu aplikasinya adalah sebagai berikut:

1. Home
2. Anggaran
3. Pembukuan
4. Report
5. Kasi
6. Parameter
7. Admin
8. Logout

Pada pelatihan ini, pengelola sumber daya dan tim pengabdian menjelaskan menu pilihan anggaran pada program aplikasi SIKADES yang merupakan menu pilihan pengelolaan formulir rincian anggaran pendapatan desa antara lain:

1. Form RKA Desa – 1 Pendapatan
2. Form RKA Desa – 1 Belanja
3. Form RKA Desa – 1 Pembiayaan
4. Form Anggaran dan Pendapatan Belanja desa

Edukasi terkait dengan pembukuan juga disajikan oleh narasumber terkait menu pilihan pembukuan pada program aplikasi SIKADES adalah menu pilihan untuk mengontrol *input* data transaksi, yang terdiri dari:

1. Input Transaksi
2. Buku Kas Umum
3. Buku Kas Pembantu Pajak
4. Buku Bank Desa
5. Buku Kas Tunai
6. Buku Panjar
7. Daftar Transaksi
8. Daftar Jurnal

Selama proses pelatihan, peserta juga berkesempatan untuk praktik langsung menggunakan aplikasi SIKADES dan mencatat transaksi penggunaan anggaran desa yang sebenarnya. Program pelatihan laporan keuangan ini juga memiliki instruktur yang

berpengetahuan luas. Program pelatihan ini memastikan peserta mahir menggunakan aplikasi. Selain latihan praktis, pelatihan ini juga memberikan sesi konsultasi dan diskusi antara peserta dan instruktur, (Ishak et al., 2024). Peserta dapat mengajukan pertanyaan atau menyuarakan kendala yang ditemui saat menggunakan aplikasi. Diskusi kelompok juga diselenggarakan untuk memfasilitasi pertukaran pengalaman dan pemecahan masalah bersama.



**Gambar 4.** Sesi Pelatihan Bersama Inpektorat, Kepala Desa dan Bendahara Desa

Berkat pelatihan yang intensif dan pengawasan yang baik, peserta berhasil menyusun laporan keuangan sederhana dengan menggunakan aplikasi SIKADES. Peserta dapat dengan mudah mencatat transaksi harian bisnis yang dijalankannya, mengelola inventaris dan membuat laporan keuangan yang terstruktur dan akurat. Keberhasilan tersebut menunjukkan efektivitas aplikasi SIKADES dalam mendukung pelaporan keuangan Desa. Penyelenggaraan pelatihan ini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah pemerintah desa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pelatihan penataan dan penyusunan laporan keuangan di kabupaten kepulauan Meranti telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Melalui pelatihan ini kepala desa dan bendahara desa memahami bagaimana menyusun dan penyusunan laporan keuangan yang lengkap agar di masa mendatang keuangan Desa dapat dikelola mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta tertib pelaksanaan disiplin anggaran. Saat menggunakan aplikasi ini, kurangnya sumber daya manusia yang memahami aplikasi ini.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE Syari'ah Bengkulu kami ucapkan yang telah mendanai seluruh rangkaian program pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Meranti dan kepala Dinas PMD kabupaten Kepulauan Meranti, Camat, Kepala Kelurahan dan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Meranti sebagai mitra kegiatan yang sudah berbaik hati memberikan kesempatan, lokasi dan waktunya kepada tim pelaksana untuk melakukan kegiatan pengabdian ini. Oleh karena itu, hal ini dapat diatur dengan sangat baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Auliantari, B. F., Indriani, E., & Mariadi, Y. (2022). Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes di Desa Jatisela. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(3). <https://doi.org/10.29303/risma.v2i3.255>
- [2] Barus, L. B., & Sinaga, R. Y. (2023). PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI INDONESIA. *Scientium Law Review (SLR)*, 2(1). <https://doi.org/10.56282/slr.v2i1.484>
- [3] Dilson, D., & Noviard, N. (2017). Metode DSRM Dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)*, 1(3). <https://doi.org/10.29207/resti.v1i3.70>
- [4] Erlina, E., Isa, M., Ishak, K., Shirotol, A., Khoirin, K. F., Ashuri, B., Helmina, S., Akmal, M., Nisalae, R., Melviyani, N., & others. (2024). Legalitas Dan Produk Halal Bagi Wirausaha Muda. *KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 18–22.
- [5] Haq, A. F., & Muzakki, K. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, 1(1). <https://doi.org/10.55732/nemr.v1i1.1041>
- [6] Hasanah, A. M. (2020). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Journal of Constitutional Law*, 2(2).
- [7] Indriani, E., Astuti, Bq. R. D., & Hudaya, R. (2021). Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan Sistem Informasi Pelaporan Keuangan Desa Bagi Perangkat Desa Se-Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. *Jurnal Abdimas Sangkabira*, 1(1). <https://doi.org/10.29303/abdimassangkabira.v1i1.26>
- [8] Ishak, K., Isa, M., Nurmahadi, N., Hamdi, M., Mustafa, H., Haikal, F., Manalu, R., & Putra, D. M. S. (2024). Pelatihan Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Peluang Bisnis Generasi Z Di Era 5.0 Pada Siswa MA Kecamatan Bengkalis. *KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–6.
- [9] Ishak, K., Khoirin, K. F., Pratama, B. I., Selamat, M. I., & Junery, M. F. (2022). Determinan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(2), 245–258.
- [10] Khoirin, K. F., Erlina, E., Siswati, S., Julia, J., & Mashitah, D. (2024a). @article{ishak2024pelatihan, title={Pelatihan Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Peluang Bisnis Generasi Z Di Era 5.0 Pada Siswa MA Kecamatan Bengkalis}, author={Ishak, Khodijah and Isa, Muhammad and Nurmahadi, Nurmahadi and Hamdi, Muhammad and Mustafa, Hak. *KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 7–10.
- [11] Khoirin, K. F., Erlina, E., Siswati, S., Julia, J., & Mashitah, D. (2024b). Kewirausahaan Untuk Kepemudaan: Pelatihan Pengelolaan Limbah Tempurung Kelapa Dalam Meningkatkan Pendapatan Pemuda Desa. *KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 7–10.
- [12] Marthen Lona. (2023). Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Oebafok Kecamatan Rote Barat Daya. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 10(2). <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v10i2.673>
- [13] Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019), Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah. In *Journal of Economic, business and ....*



- [14] Moehariono, M. (2007). Kualitas Layanan Publik Aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Timur. *Majalah Ekonomi Universitas Airlangga*.
- [15] Niam, S., Mashuri, Selamat, M. I., Suhartini, A., & Khoirin, K. F. (2024). Growth of UMKM in Dedap Village, Meranti District: Promotion, Location, and Product Quality. *International Journal of Sustainable Applied Sciences (IJSAS)*, 2(6), 579–592.
- [16] Nurmahadi, N., Isa, M., Ishak, K., Mashuri, M., Susilawati, S., Azlan, M., Cahya, A. N., Cahyati, W. T., Sakbaniah, N., Triawan, J., & others. (2024). Pembinaan Jiwa Wirausaha Pada Generasi Z Di Madrasah Aliyah Darusalam Pematang Duku Timur Kabupaten Bengkalis. *KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 11–17.
- [17] Oktari, V., Zarefar, A., Afifah, U., & Khoiriyah, M. (2022). Village Fund Management Accountability and Its Implications on Village Government Performance. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 6(2). <https://doi.org/10.33603/jka.v6i2.7236>
- [18] Permatasari, I. A. (2020). Kajian Penerapan Prinsip Good Governance Pemerintah Kabupaten Lebak. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 4(1). <https://doi.org/10.37950/jkpd.v4i1.99>
- [19] Permendagri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. In *Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia*.
- [20] Pramana, A. C., Rahmadi, A. N., Ruhamak, D., Listiyaningrum, I., Sitoesmi, F. A. A., & Prihardina, O. W. (2022). Peningkatan Kemampuan Perangkat Desa Dalam Tata Kelola Kearsipan Di Desa Sengkut Kabupaten Nganjuk. *JANKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1). <https://doi.org/10.30737/janka.v1i1.2359>
- [21] Pranata, D. A., Darmawan, A., & Hartono, S. (2023). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(9).
- [22] Ridwan, R. (2016). Sistem Operasi Bank Syariah Dan Penyajian Dalam Akuntansi Syariah. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 9(2). <https://doi.org/10.30984/as.v9i2.30>
- [23] Rivan, A., Maksun, I. R., & others. (2019). @article{ishak2022determinan, title={Determinan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah}, author={Ishak, Khodijah and Khoirin, Kurniatul Fil and Pratama, Brilianza Indra and Selamat, Muhammad Isa and Junery, Muhammad Fadhil}, journal={JAS (. Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)), 9(2), 92–100.
- [24] Sahroni, A., Batubara, Z., Mehilda, S., & Erlina, E. (2024). Analisis Sistem Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. *Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 1(2), 113–121.
- [25] Said, S. S., Ilato, R., Abdussamad, J., Prihatini, F., & Tui, D. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(7).
- [26] Savitri, E., Andreas, A., & Diyanto, V. (2019). Peningkatan pendapatan asli desa melalui pembinaan revitalisasi BUMDes dan tata kelola dana desa. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 1. <https://doi.org/10.31258/unricsce.1.606-613>
- [27] Sulaeman, A. S. (2021). Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Belanja Dan Pelaporan Keuangan Melalui Program Asistensi Dana Desa. *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat (JANAYU)*, 2(1). <https://doi.org/10.22219/janayu.v2i1.12570>
- [28] Tomisa, M. E., & Sutrisno. (2018). Analisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Menurut Perspektif Syariah. *Jurnal Sistem Akuntansi*, 71, 228–258.